



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR 34 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, dibutuhkan sebuah program yang menjadi instrumen perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
8. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 30 November 2021.

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Prov. Sulsel yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 30 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan agenda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tetap menjadi agenda tahunan selain Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selain dari Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, yang dianggap prioritas dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Anggaran untuk menunjang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, termuat dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Pos Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 November 2021



KETUA DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ANDANA KARTIKA SARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR

: 34 Tahun 2021

TANGGAL

: 30 NOVEMBER 2021

TENTANG

: PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	PENGUSUL
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/P ENJELASAN			
1	Ranperda	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu	√		Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	√		1. Dinas Sosial Prov. Sulsel. 2. Biro Hukum Setda Prov. Sulsel	Januari	DPRD
2	Ranperda	Pengelolaan Sampah Regional	1.kebijakan pengelolaan sampah; 2.strategi pengelolaan sampah regional; 3.pengembangan dan penerapan teknologi; 4.kegiatan pengelolaan kawasan;	√		1.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 208 tentang Pengelolaan Sampah; 2.Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	√		1. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulsel. 2. Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Prov. Sulsel	Januari	DPRD
3	Ranperda	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Pedoman terkait ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	√		1.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- Undangan 2.Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	√		Biro Hukum Setda Prov. Sulsel	Januari	DPRD

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	PENGUSUL
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/PENJELASAN			
4	Ranperda	Sistem Pertanian Organik	1. Perencanaan Sistem Pertanian Organik; 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pertanian Organik; 3. Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik; 4. Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengelolaan, kelembagaan Sistem Pertanian Organik; 5. Sertifikasi Pelabelan;	√		1.Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2.Permentan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik; 3. Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lahan Pangan Pertanian	√		1.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan hortikultura	Januari	DPRD
5	Ranperda	Transfomrasi Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan	1. Untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi perpustakaan di Sulawesi Selatan; 2. Untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis tekonologi informasi dan komunikasi serta sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat.	√		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.	√		Dinas Perpustakaan Prov. Sulsel	Januari	DPRD

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	PENGUSUL
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/PENJELASAN			
6	Ranperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perubahan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan		√	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD		√	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	Maret	DPRD
7	Ranperda	Pelestarian Aksara Lontara	Terkait pelestarian dan pemeliharaan bahasa daerah aksara lontara	√		1. Undang- Undang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra.	√		Dinas Kebudayaan Prov. Sulsel	Agustus	DPRD
8	Ranperda	Pesantren	1. Pembinaan dan pemberdayaan pesantren 2. Partisipasi masyarakat, sinergitas, kerja sama dan kemitraan	√		1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	√		Dinas Pendidikan Prov. Sulsel	April	DPRD
9	Ranperda	Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove	Kebijakan Pengelolaan, pemanfaatan, perijinan, penataan, pengawasan hutan mangrove,	√		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√		Dinas Kehutanan Prov. Sulsel	April	DPRD

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	PENGUSUL
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/PENJELASAN			
10	Ranperda	Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Upaya pemerintah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan Pencegahan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.	√		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	√		Dinas Sosial Prov. Sulsel	Juni	DPRD
11	Ranperda	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2040	perencanaan Penataan Ruang, struktur ruang dan pola ruang	√		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang	√		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Januari	Gubernur
12	Ranperda	Rencana Umum Energi Daerah	Rencana Umum Energi Daerah adalah kebijakan pemerintah provinsi yang mengacu kepada Perpres 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Daerah	√		Perintah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Daerah	√		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Januari	Gubernur
13	Ranperda	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1.Mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya fasilitasi pencegahan & pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah; 2.Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; 3.Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor	√		1.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2.Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 3.Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	√		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel.	Januari	Gubernur

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISEKAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	PENGUSUL
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/P ENJELASAN			
14	Ranperda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan, penggabungan perangkat daerah		√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Sepanjang terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)		√	Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel	2022	Gubernur
15	Ranperda	Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Agribisnis	Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Agribisnis menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	√		1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulsel	2022	Gubernur

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	PENGUSUL
				BARU	UBAH		NA	KETERANGAN/PENJELASAN			
16	Ranperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah.		√	1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		√	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulsel	2022	Gubernur

